



LAPORAN AKHIR PENELITIAN

DAMPAK PROGRAM SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI KPK :

***SUCCESS STORIES* PAKSI PENDIDIK, APIP DAN KOMUNITAS**

Disusun oleh :

Asriana Issa Sofia

Retno Hendrowati

**Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset, dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Paramadina
2022**



SURAT PERNYATAAN DAN VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Asriana Issa Sofia
2. Fakultas: Ilmu Falsafah dan Peradaban
3. Alamat : Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/Penelitian yang saya ajukan dengan judul: **“Dampak Program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi KPK : *Success Stories* PAKSI Pendidik, APIP dan Komunitas”**, merupakan hasil karya saya dan tim sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya dan tim maka sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 16 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,

Asriana Issa Sofia

LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian dengan judul:

Dampak Program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi KPK terhadap Kompetensi Penyuluh Antikorupsi : *Success Stories* PAKSI Pendidik, APIP dan Komunitas

Peneliti:

1. Asriana Issa Sofia. MA
2. Retno Hendrowati, M.T.

Biaya penelitian : Rp. 4.000.000,-

Telah disahkan oleh Direktur Lembaga Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dan diketahui oleh Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, pada:

Hari/Tanggal: 16 Agustus 2022

Yang mensahkan dan mengetahui:

**Direktur Lembaga Penelitian, dan
Pengabdian Masyarakat**



(Dr. Sunaryo)

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban



(Dr. Tatok Djoko Sudiarto, MIB)

ABSTRAK

Strategi baru 3 Pronged Strategy (strategi Trisula) yang digunakan KPK dalam memberantas korupsi menempatkan pendidikan sebagai sebuah strategi terpisah dan dirancang dengan baik, didukung dengan pengembangan kelembagaan dan instrumen di dalam KPK. KPK memprakarsai peran Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), yang saat ini sudah mencapai lebih dari 2000-an orang lintas wilayah dan profesi. Kompetensi Penyuluh Antikorupsi yang terstandarisasi secara nasional dibentuk melalui program Sertifikasi, yang selanjutnya ditingkatkan dengan program-program *capacity building*.

Setelah berjalan beberapa tahun, perlu diketahui bagaimana dampak atau keberlanjutan penyuluhan antikorupsi yang dilakukan oleh para PAKSI? Maka penting untuk melakukan evaluasi dampak program Sertifikasi terhadap kompetensi dan aktifitas Penyuluh Antikorupsi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap tiga kelompok Penyuluh Antikorupsi dari kalangan Pendidik, APIP, dan Komunitas, dan menganalisisnya dengan menggunakan teori *Kirkpatrick's Model Of Learning Evaluation*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi efektif dan sukses dalam mendukung peningkatan kompetensi dan aktifitas Penyuluh Antikorupsi di Indonesia.

Kata kunci : *Penyuluh Antikorupsi, KPK, sertifikasi, kompetensi*

ABSTRACT

The new strategy 3 Pronged Strategy used by the KPK in eradicating corruption places education as a separate and well-designed strategy, supported by the development of institutions and instruments within the KPK. The KPK initiated the role of the Anti-Corruption Trainer, which currently has more than 2000 people across regions and professions. Nationally standardized competence of Anti-Corruption Trainers is established through the Certification program, which is further enhanced by capacity building programs.

After several years, it is necessary to know how the impact or sustainability of the anti-corruption education carried out by PAKSI will be? It is important to evaluate the impact of the Certification program on the competence and activities of the Anti-Corruption Trainers. This study uses interviews with three groups of Anti-Corruption Trainers from the Educators, APIP, and the Community, and analyzes them using Kirkpatrick's Model Of Learning Evaluation theory. The results of this study conclude that the Anti-Corruption Instructor Certification program is effective and successful in supporting the improvement of the competence and activities of Anti-Corruption Trainers in Indonesia.

Keywords: Anti-corruption Counselor, KPK, certification, competence

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN DAN VALIDASI.....	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
ABSTRAK.....	4
ABSTRACT.....	5
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I. PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1. 2 Rumusan Masalan dan Tujuan Penelitian.....	12
BAB II. KERANGKA TEORI	13
2.1 Penyuluhan.....	13
2.2 Evaluasi Dampak Penyuluhan	16
BAB III. METODE PENELITIAN	19
3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	19
BAB IV. PEMBAHASAN.....	22
4.1 Hasil Wawancara	22
4.2 Analisa Hasil.....	28
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	31
5.1 Kesimpulan	31
5.2 Rekomendasi.....	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN : SUCCESS STORY PAKSI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Responden	20
Tabel 2 Petikan Wawancara dengan Responden	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Strategi Pemberantasan Korupsi dengan 3 Pronged Strategy (strategi Trisula)	8
Gambar 2 Persentase PAKSI berdasarkan gender	10
Gambar 3 Persentase PAKSI berdasarkan wilayah geografis.....	11
Gambar 4 Sebaran PAKSI (Non Peg KPK) berdasarkan Profesi	11

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Problematika korupsi di Indonesia menjadi pekerjaan rumah bangsa yang tak kunjung usai. Sepanjang waktu kasus-kasus tindak pidana korupsi terus terungkap di berbagai sektor, profesi dan jenis perbuatannya, maka harus dihadapi dengan upaya-upaya yang luarbiasa juga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), garda depan pemberantasan korupsi di Indonesia pun terus melakukan adaptasi dengan dinamika permasalahan korupsi yang berlangsung. Di tataran regulasi, Undang-Undang No 30 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c,d,e UU tersebut lebih menegaskan tugas KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi, dengan wewenangnya untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan; merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; serta melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat.

Di tataran kelembagaan, penanggungjawab tugas terkait dinaikkan posisinya ke tingkat eselon 1 yaitu Direktorat Pendidikan dan Peran Serta yang membawahi Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye, Direktorat Peran Serta Masyarakat, dan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan di tataran strategi, dilakukan reformulasi pendekatan memberantasan korupsi, yang semula hanya pendekatan hukum (penindakan) dan pendekatan non hukum (pencegahan), menjadi menggunakan pendekatan Trisula (3 Pronged Strategy), seperti gambar berikut ini.



Gambar 1 Strategi Pemberantasan Korupsi dengan 3 Pronged Strategy (strategi Trisula)

(Suprapdiono, 2020)

Strategi Trisula terdiri dari tiga pendekatan yang bersifat saling melengkapi (*complementary*). (ACLC,2022) Pendekatan pertama yaitu penindakan hukum (*repressive*), yang bertujuan menimbulkan efek jera bagi koruptor dan orang menjadi takut korupsi. Di sini KPK melakukan verifikasi pengaduan masyarakat dan menerapkan proses penyelidikan – penyidikan – penuntutan – eksekusi hukuman terhadap koruptor. Pendekatan kedua yaitu pencegahan (*preventive*), yang bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya korupsi melalui perbaikan sistem. Di sini KPK melakukan kajian-kajian untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem kepada kementerian dan lembaga-lembaga negara, mendorong perbaikan kebijakan, penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan (kopsurgah), serta transparansi penyelenggara negara melalui pelaporan LHKPN. Pendekatan ketiga adalah pendidikan (*preemptive*), yang bertujuan agar orang tidak ingin atau tidak mau korupsi. Disini KPK gencar melakukan kampanye dan pendidikan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi dan sadar akan dampak korupsi. Agar ketiga pendekatan tersebut dapat efektif secara simultan, maka diperlukan kecukupan hukum, kecukupan sumber daya, dan peran serta masyarakat.

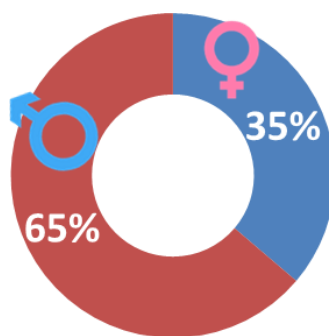
Sebagai strategi *preemptive* untuk menghalau lebih awal korupsi, pendidikanlah yang paling dapat memberdayakan peran serta masyarakat secara maksimal. Menyuarakan dan menguatkan budaya antikorupsi melalui pendidikan, sosialisasi dan kampanye seluas-luasnya di kalangan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat itu sendiri. Di ranah pendidikan formal, sejauh ini KPK telah mendorong hingga diterbitkannya kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan antikorupsi, termasuk memfasilitasi implementasi pendidikan integritas dan antikorupsi di tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

Untuk mendorong peran masyarakat dan mempercepat pemberantasan korupsi, dalam beberapa tahun terakhir KPK telah menginisiasi sebuah peran baru masyarakat, yaitu agen-agen perubahan yang disebut sebagai Penyuluh Antikorupsi. Penyuluh Antikorupsi adalah seorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai antikorupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi, dan menggerakkan masyarakat, aparatur sipil negara dan aparat penegak hukum dan militer, swasta, dan komunitas untuk menjadi agen perubahan dan menjadi *role model* dalam upaya pemberantasan korupsi (KPK RI, 2022). Pengertian ini menunjukkan peran strategis Penyuluh Antikorupsi, sehingga eksistensinya perlu diperbanyak dan tersebar di sektor-sektor pemerintahan, swasta, dan segmen masyarakat lainnya di wilayah-wilayah Indonesia, tentunya

selain di internal KPK. Penyuluh Antikorupsi diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan KPK dalam memenuhi berbagai kegiatan pembelajaran antikorupsi. (KPK, 2022)

Untuk menjamin kualifikasi Penyuluh Antikorupsi, KPK menciptakan program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi. Pada tahun 2017 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK diresmikan oleh Pimpinan KPK dan dilisensi oleh Badan Nasional Standar Profesi (BNSP), dan segera dilengkapi dengan perangkat Kode Etik Penyuluh Antikorupsi dan Asesor-asesor Kompetensi. Program Sertifikasi melakukan Uji Kompetensi terhadap penyuluh antikorupsi dengan mengacu pada standar nasional SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Sejak itu kegiatan-kegiatan asesmen diselenggarakan dan terus mencetak PAKSI bersertifikasi. Tahun 2019 LSP merintis kemitraan dengan Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak di daerah untuk memperluas jangkauan penyelenggaraan Program Sertifikasi. Berjalannya waktu program Sertifikasi ini terus berlanjut, bahkan kondisi pandemic Covid 19 tidak menjadi kendala. LSP KPK meluncurkan inovasi pelaksanaan Asesmen Jarak Jauh secara daring menggunakan aplikasi AKSESKU. Alhasil, sepanjang tahun 2020–2021 pelaksanaan asesmen justru semakin masif dan melejitkan jumlah PAKSI bersertifikasi. (LSP KPK, 2021)

Hingga Desember 2021 sudah ada 2047 orang PAKSI di seluruh Indonesia. Data dibawah ini menunjukkan bahwa PAKSI bersifat lintas gender, dimana terdapat PAKSI perempuan (35%) maupun PAKSI laki-laki (65%).

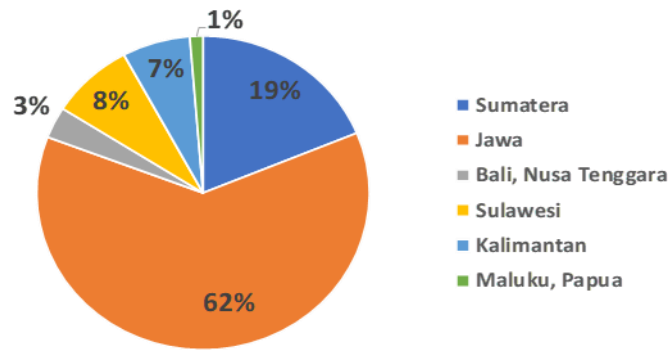


Gambar 2 Persentase PAKSI berdasarkan gender

Sumber : KPK (KPK, 2021)

Data berikut ini menunjukkan persebaran keberadaan PAKSI, dimana PAKSI sudah ada di 34 provinsi di Indonesia dengan dominasi berada di pulau Jawa. KPK terus mempromosikan

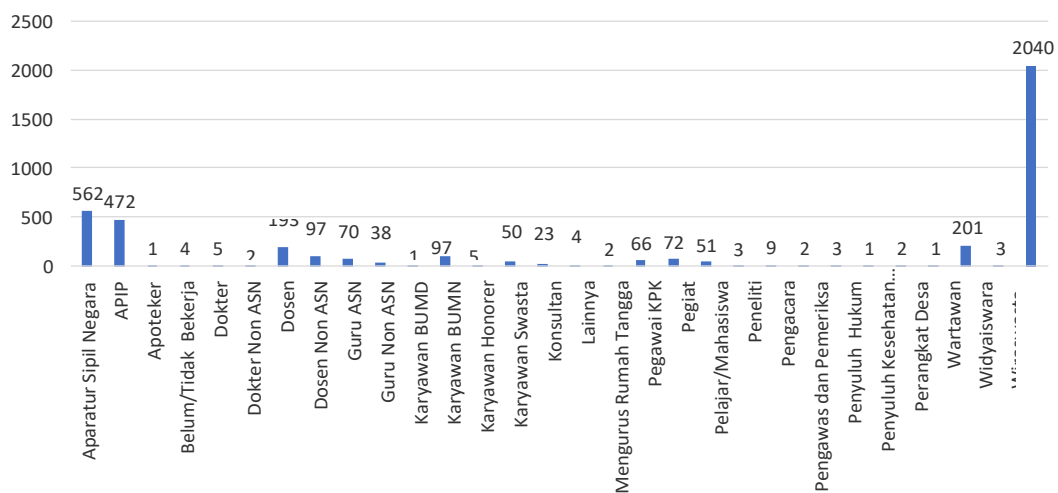
peran PAKSI dan program Sertifikasi hingga wilayah-wilayah pelosok untuk membangun kecukupan SDM



Gambar 3 Persentase PAKSI berdasarkan wilayah geografis

Sumber : KPK, (KPK, 2021)

Di sisi lain, hal menarik disajikan oleh data berikut ini terkait sifat PAKSI yang lintas profesi. Selain PAKSI yang berasal dari internal KPK, PAKSI berasal dari beragam profesi seperti Aparatur Sipil Negara, karyawan BUMD dan BUMN, karyawan swasta, widyaiswara, dosen, guru, konsultan, pengawas dan pemeriksa, pengacara, dokter, apoteker, wiraswasta, perangkat desa, wartawan, pelajar dan mahasiswa, filantropis, bahkan marbot masjid, ibu rumah tangga, dan mereka yang belum bekerja. Jumlah terbanyak PAKSI dari kalangan ASN sebagai hasil dari program-program pendidikan dan pelatihan penyuluh antikorupsi yang memang digencarkan KPK di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.



Gambar 4 Sebaran PAKSI (Non Peg KPK) berdasarkan Profesi

Sumber : KPK (KPK, 2021)

Jumlah PAKSI yang semakin banyak dan meluas kemudian menumbuhkan komunitas-komunitas dan forum-forum antikorupsi yang berbasis wilayah, profesi, bahkan minat dan talenta, untuk berjejaring dan berkolaborasi antar PAKSI, bahkan antar forum dan komunitas. Hingga akhir tahun 2021 sudah ada 40-an komunitas dan forum dan jumlahnya terus bertambah.

1. 2 Rumusan Masalan dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana dampak program Sertifikasi terhadap peningkatan kompetensi para Penyuluh Antikorupsi pasca sertifikasi ?

Dengan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program Sertifikasi penyuluhan Antikorupsi terhadap peningkatan kompetensi Para Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) pasca pelatihan penyuluhan / pelatihan sertifikasi.

Adapun studi kasus yang dalam penelitian ini adalah PAKSI dari kalangan Pendidik, kalangan APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah), dan kalangan Komunitas. Alasan pemilihan kategori PAKSI tersebut dijelaskan pada bab Metode Penelitian.

BAB II. KERANGKA TEORI

2.1 Penyuluhan

Pada hakekatnya penyuluhan adalah suatu kegiatan komunikasi. (Muhammad Thamrin, 2011). Kegiatan komunikasi yang dimaksud terkait dengan proses yang dialami oleh kelompok sasaran mulai dari mengetahui, memahami, meminati, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. Penyuluhan dapat dilakukan untuk berbagai bidang, di antaranya penyuluhan Antikorupsi. Penyuluh antikorupsi adalah seseorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai antikorupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi, dan menggerakkan masyarakat, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum dan militer, swasta, dan komunitas untuk menjadi agen perubahan, dan menjadi *role model* dalam upaya pemberantasan korupsi. Penting bagi kegiatan penyuluhan agar memiliki standar yang jelas dan terukur. Standar kompetensi Antikorupsi telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Bidang Penyuluhan Pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi.

Berdasarkan Kemenaker tersebut disebutkan tujuan, fungsi dan kompetensi kegiatan penyuluhan Antikorupsi. Tujuan utama penyusunan standar kompetensi adalah : meningkatkan partisipasi seluruh elemen bangsa dalam upaya pencegahan korupsi secara efektif. Adapun Fungsi utama penyusunan standar kompetensi adalah :

1. Memiliki dasar-dasar melakukan penyuluhan antikorupsi
2. melakukan penyadaran antikorupsi kepada kelompok sasaran
3. meningkatkan kompetensi kelompok sasaran
4. mendorong terbentuknya lembaga antikorupsi
5. membangun Jejaring kerja
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan

Kompetensi Penyuluh Antikorupsi :

- a) Pengetahuan : Integritas, akuntabilitas, transparansi
- b) Keterampilan : yaitu [1] melakukan komunikasi yang efektif dan [2] menyatakan pendapat dalam situasi yang sulit

- c) Sikap Kerja : disiplin, tanggung jawab, mandiri, mau bekerja keras, berani mengemukakan pendapat dan menegur dan berpikir kritis.
- d) Aspek kritis : mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya

Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan/atau internasional. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (KPK RI , 2021).

Berdasarkan data dari KPK, (KPK RI, 2021), standar kompetensi yang ditetapkan oleh SKKNI No 303 Tahun 2016, dan LSP KPK menetapkan jenjang atau skema PAKSI menjadi 4 (empat) jenjang. Semakin tinggi jenjangnya, maka Paksi semakin dituntut menguasai lebih banyak unit kompetensi dalam menyebarkan paham antikorupsi di Indonesia. Keempat jenjang tersebut adalah: Pertama, Muda (Pratama), Madya, dan Utama, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut..

a) Jenjang 1 - Paksi Pertama

PAKSI Pertama adalah tingkatan Paksi yang memiliki kompetensi memberikan penyuluhan antikorupsi pada lingkup organisasi dan jejaringnya. PAKSI Pertama harus memiliki 5 (lima) Unit Kompetensi dasar, yaitu :

1. Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
2. Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
3. Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
4. Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
5. Membangun Sikap Antikorupsi

b) Jenjang 2 – PAKSI Muda (Pratama)

PAKSI Muda (Pratama) adalah tingkatan Paksi yang memiliki kompetensi memberi penyuluhan antikorupsi pada lingkup organisasi dan jejaringnya, serta pada bidang di luar organisasinya sesuai penugasan oleh KPK dan/atau Lembaga/Organisasi lainnya. PAKSI Muda harus menguasai 9 unit kompetensi, terdiri dari 5 unit kompetensi PAKSI Pertama ditambah 4 unit kompetensi yaitu

1. Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi

2. Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
3. Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi
4. Membangun Sikap Antikorupsi

c) Jenjang 3 – PAKSI Madya

Paksi Madya merupakan tingkatan PAKSI yang selain dapat memberikan penyuluhan antikorupsi di organisasi serta luar organisasinya sesuai penugasan, juga memiliki kompetensi untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas atau forum antikorupsi. Paksi Madya dipersyaratkan memiliki 17 unit kompetensi, terdiri dari 9 unit kompetensi PAKSI Muda ditambah 8 unit kompetensi yaitu

1. Menumbuhkembangkan Kelembagaan Antikorupsi
2. Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran
3. Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi
4. Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
5. Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
6. Menumbuhkan Jejaring Kerja Antar Kelompok Sasaran
7. Melakukan Kolaborasi
8. Memobilisasi Gerakan Antikorupsi

d) Jenjang 4 – PAKSI Utama

Paksi Utama merupakan tingkatan tertinggi yang selain dapat menyuluh antikorupsi di organisasi, luar organisasi, dan memberikan pendampingan komunitas, juga berkompeten untuk melakukan monitoring dan evaluasi program penyuluhan antikorupsi. PAKSI Utama harus memiliki 20 unit kompetensi yang terdiri dari 17 unit kompetensi PAKSI Madya ditambah 3 unit kompetensi yaitu

1. Memantau Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
3. Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi

e) Kode Etik Profesi Paksi

Selain kompetensi pengetahuan antikorupsi dan ketrampilan menyuluh antikorupsi, seorang PAKSI harus memiliki integritas tinggi, termasuk mematuhi kode etik profesi PAKSI. Merupakan kewajiban untuk menerapkan kode etik ini, dan pelanggarannya

dapat menyebabkan pencabutan sertifikat Paksi. Kode Etik Profesi PAKSI yaitu Nilai Dasar Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan

Program sertifikasi Penyuluh Antikorupsi merupakan sebuah proses asesmen untuk menguji kompetensi asesi dengan cara menelusuri bukti-bukti melalui verifikasi portofolio dan alat uji lain seperti wawancara, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, unjuk kerja, dan penyusunan dokumen. Asesor akan memberikan rekomendasi apakah seorang asesi dapat dinyatakan kompeten atau tidak. Jika direkomendasikan kompeten dan disahkan oleh sidang pleno LSP KPK, maka asesi dinyatakan sebagai PAKSI bersertifikasi (sesuai jenjangnya) oleh LSP, yang mana sertifikat kompetensinya dikeluarkan oleh BNSP. Sertifikasi berlaku 3 (tiga) tahun dan harus melakukan perpanjangan ataupun naik jenjang, melalui RCC (Recognition Current Competency)

2.2 Evaluasi Dampak Penyuluhan

Evaluasi merupakan penilaian yang terukur dan independen dari kegiatan yang telah selesai atau sedang berlangsung untuk menentukan sejauh mana pembelajar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap pengambilan keputusan (Donna M. Merten, 2019). Penilaian terukur harus sesuai prosedur, desain dan metodologi dan umumnya melibatkan analisis yang lebih luas. Pelaku evaluasi atau evaluator dibedakan atas evaluator internal dan eksternal. Evaluator Internal adalah seseorang yang melakukan evaluasi dan merupakan bagian atau karyawan dari organisasi yang dievaluasi. Sedangkan evaluator eksternal adalah Seseorang yang melakukan evaluasi tetapi bukan karyawan dari organisasi yang dievaluasi.

Evaluasi terbagi atas evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu dengan mengumpulkan informasi agar pengembangan program penyuluhan dapat berjalan efektif. Evaluasi sumatif dilakukan untuk mengukur hasil akhir suatu program agar dapat mengambil keputusan apakah program dapat dilanjutkan, dikembangkan atau diperkecil. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif ataupun kualitatif. Data kualitatif paling banyak membantu dalam meningkatkan program penyuluhan.

Evaluasi dampak pembelajaran (Kartikawati, 2020) yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah peserta pembelajaran kembali ke unit kerja masing-masing untuk mengetahui penerapan hasil pembelajaran dalam pekerjaan dan dampak pembelajaran terhadap kinerja

peserta. Secara ideal, evaluasi dampak pembelajaran tersebut ditujukan untuk mengetahui analisa kebutuhan pembelajaran.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pasca Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, Evaluasi pasca pembelajaran terdiri atas Evaluasi implementasi pembelajaran dan Evaluasi dampak pembelajaran. Kegiatan Evaluasi implementasi hasil Pembelajaran bertujuan untuk mengetahui penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam Pembelajaran. Evaluasi implementasi hasil Pembelajaran dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan pada alumni yang telah mengikuti kegiatan diklat. Kegiatan Evaluasi dampak Pembelajaran bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan kinerja sebagai hasil dari Pembelajaran.

Hasil evaluasi dampak program diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan terkait keefektifan pelatihan, kelebihan pelatihan, dan dapat sebagai bahan penentuan berbagai program alternatif. Selain itu evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh suatu program dapat memberikan pengaruh kepada sasaran dan diukur berdasar kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian sebuah tujuan pelatihan/penyuluhan.

Evaluasi pembelajaran/pelatihan/penyuluhan dengan model Kirkpatrick telah digunakan lebih dari lima puluh tahun. Model ini berdasarkan pada evaluasi pembelajaran pada empat level yaitu : (Kirkpatrick, 2007)

- **Reaksi (level 1).** Evaluasi level ini ditujukan untuk mendapatkan masukan dari peserta terhadap seluruh proses pelatihan. Data reaksi pengalaman dari peserta, terutama pada aspek relevansi, kepuasan, dan keterlibatan peserta dan pengajar. Namun data ini tidak mampu menangkap apakah tujuan pembelajaran tercapai, maupun dampak terhadap organisasi.
- **Pembelajaran (level 2).** Evaluasi level ini untuk mengetahui apakah peserta berhasil (atau tidak berhasil) mempelajari sesuatu pada pelatihan. Agar dapat berjalan secara efektif, kemampuan peserta dapat diukur terlebih dahulu dalam sebuah pretest yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang dimaksud. Pengukuran dilakukan kembali setelah selesai melaksanakan pelatihan.
- **Perilaku (level 3).** Evaluasi level ini untuk Tahap mengukur hasil pelatihan terhadap perilaku. Apakah peserta melakukan implementasi terhadap apa yang telah dipelajarinya. Proses ini diukur setelah waktu jeda antara pelaksanaan pelatihan.

- **Hasil (level 4).** Evaluasi level ini merupakan item yang paling berharga dari keseluruhan model Kirkpatrick. Dengan data ini, dapat dilakukan pengukuran bagaimana pelatihan dapat memberi kontribusi terhadap kesuksesan organisasi secara menyeluruh.

Dalam hal penyuluhan sertifikasi Antikorupsi, level ini sesuai untuk mengetahui apakah PAKSI telah sukses untuk memberikan penyuluhan ke pihak-pihak yang menjadi kelompok sasaran. Faktor kesuksesan sendiri dapat dilihat dari parameter seperti pemenuhan kompetensi pada unit kerja terkait, dan pengembangan kinerja individu demi memenuhi target kinerja serta tentunya dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari organisasi KPK yang menyelenggarakan program penyuluhan Antikorupsi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif penelitian dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara utuh dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lubis, 2022).

Analisis data dapat dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif dimulai dari fakta empiris, studi ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Hasil penelitian merupakan hasil analisis data dan informasi dengan memberikan interpretasi dari pembahasan subjek-subjek sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data atau penggalian informasi melalui wawancara ke responden (informan).

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau informasi dilakukan melalui wawancara dengan cara peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan pertanyaan terbuka, dan wawancara dilakukan secara tertulis. Wawancara difokuskan pada isi pertanyaan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

a) Responden

Evaluasi pasca sertifikasi merupakan umpan balik untuk membantu proses evaluasi tingkat keberhasilan PAKSI. Untuk mengetahui apakah sertifikasi kompetensi telah berdampak sesuai tujuannya, diperlukan umpan balik dari pihak yang terlibat dalam sertifikasi tersebut atau responden yang dimaksud dalam penelitian ini.

Responden penelitian ini adalah para PAKSI yang telah bersertifikasi Penyuluh Antikorupsi dari LSP KPK, dalam tiga kategori yang dipilih berdasarkan korelasi antara tupoksi (tugas pokok dan fungsi) profesinya dengan kegiatan menyuluh antikorupsi. Ketiga kelompok responden tersebut yaitu

1. PAKSI Pendidik yang meliputi Widyaiswara, Dosen dan Guru

PAKSI kalangan Pendidik memiliki korelasi yang erat antara tugasnya mengajar dengan kegiatan menyuluh antikorupsi. Setiap pendidik sejatinya sudah memiliki kecakapan mengajar yang mumpuni di bidangnya. Jika disematkan kompetensi antikorupsi, maka akan melahirkan penyuluh antikorupsi yang potensial.

2. PAKSI Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

PAKSI kalangan APIP kurang memiliki korelasi antara tupoksinya sebagai pengawas internal pemerintah di daerahnya dengan aktifitas menyuluh antikorupsi. APIP dibentuk dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya melalui pencegahan korupsi. Hingga akhir 2021, terdapat 472 orang PAKSI bersertifikasi berprofesi sebagai APIP (dan SPI) baik di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, maupun Kementerian/Lembaga. Jumlah ini belum memadai mengingat banyak inspektorat dan kementerian/lembaga belum memiliki penyuluh antikorupsi, sehingga upaya pencegahan korupsinya menjadi kurang optimal.

3. PAKSI Komunitas

Komunitas dan Forum hampir tidak memiliki korelasi antara tupoksinya dengan aktifitas menyuluh antikorupsi. Komunitas antikorupsi hadir sebagai gerakan dari masyarakat untuk masyarakat, menyalakan jiwa integritas dan antikorupsi di semua lini. Efek samping dari gelombang penyuluh antikorupsi ialah pertumbuhan forum dan komunitas antikorupsi. Eksistensinya tak lepas dari peran PAKSI-PAKSI bersertifikasi Madya yang mengembangkan dan memberdayakannya melalui pendampingan aksi, memfasilitasi kolaborasi, serta memobilisasi kampanye dan gerakan antikorupsi. Komunitas-komunitas antikorupsi bekerja dengan caranya sendiri. Mereka terjun dalam proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

Jumlah responden yang terlibat seperti dalam table berikut :

Tabel 1 Jumlah Responden

Kelompok PAKSI	Jumlah
Pendidik	6
PIP	4
Komunitas	4
Total	13

b) Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan diolah merupakan data primer yaitu berasal dari responden langsung melalui wawancara. Jenis data tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Identitas PAKSI (termasuk posisi dan jenjang sertifikasi)
- b) Motivasi mengikuti sertifikasi
- c) Manfaat yang didapatkan pasca mendapatkan sertifikasi PAKSI
- d) Aksi dan inovasi PAKSI

c) Instrumen

Sesuai dengan jenis data tersebut, instrumen wawancara berisi pertanyaan pokok terkait identitas diri responden, diikuti dengan pertanyaan menyesuaikan kategori . Pertanyaan bersifat terbuka.

Lingkup pertanyaan wawancara untuk responden PAKSI Pendidik dan APIP :

1. Identitas (Nama, profesi, jabatan, instansi, tahun dan jenjang sertifikasi PAKSI)
2. Motivasi menjadi penyuluh antikorupsi dan mengambil sertifikasi profesi PAKSI.
3. Dampak atau manfaat sertifikasi kompetensi bagi pribadi, pekerjaan, dan instansi.
4. Aksi/inovasi/prestasi yang terkait penyuluhan antikorupsi, pasca sertifikasi.

Lingkup pertanyaan wawancara untuk responden PAKSI Komunitas Antikorupsi:

1. Identitas (Nama, profesi, jabatan, instansi, tahun dan jenjang sertifikasi PAKSI)
2. Posisi dalam Komunitas
3. Profil Komunitas (latar belakang pembentukan, korelasi dengan gerakan antikorupsi, keanggotaan, dan perkembangan komunitas).
4. Pencapaian / prestasi Komunitas dalam gerakan antikorupsi.
5. Aksi/inovasi/prestasi yang menonjol dari Komunitas.

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1 Hasil Wawancara

Hasil wawancara peneliti dengan semua responden tersebut secara ringkas disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 Petikan Wawancara dengan Responden

PAKSI PENDIDIK		
No.	Identitas PAKSI	Petikan Wawancara
1	Aris Supriyanto, Widyaiswara BSDMD Provinsi Lampung , PAKSI jenjang Utama	<p>Prihatin dengan kondisi bangsa dan sebagai auditor sering menghadapi tindak pidana korupsi, memutuskan menjadi penyuluh antikorupsi sebagai ladang ibadah sekaligus mendukung prodesi sebagai auditor. Menjadi penyuluh bersertifikasi karena ingin menyamakan persepsi dalam materi dan metode penyuluh, serta meningkatkan pemahaman antikorupsi sesuai standar.</p> <p>Semakin terampil melakukan improvisasi-improvisasi membuat penyuluhan menarik.</p> <p>Inovasi membentuk dan mengetuai Forum Penyuluh Antikorupsi Lampung, dan Gerakan ASN Berintegritas ; memperluas jaringan dengan pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam pencegahan korupsi.</p>
2	Nurhikmah, Widyaiswara BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, PAKSI jenjang Muda	<p>Menjadikan tantangan, apalagi keseharian mengajarkannya kepada peserta ASN dan non ASN, menambah kompetensi sosiokultural sebagai widyaiswara</p> <p>Bersertifikasi menjadi pengingat diri untuk konsisten, menjadi <i>role model</i>, dan semakin berani dalam menerapkan nilai integritas, menambah jejaring dan pengetahuan.</p> <p>Menyebarkan integritas melalui pengajaran Latihan Dasar CPNS, menjadi fasilitator dan tim pengembang kurikulum, narasumber pengembangan kurikulum di instansi maupun di daerah-daerah.</p> <p>Mengembangkan program Pelatihan Membangun Integritas dan Budaya Antigrafitikasi (Mantra) untuk kelompok-kelompok ASN dan non-ASN di wilayah setempat.</p>
3	Daisy Novira, dosen matakuliah	<p>Ingin mengambil peran dalam pencegahan korupsi melalui edukasi, dan memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada mahasiswa.</p>

	<p>Pendidikan Antikorupsi di STIKES Sapta Bhakti Bengkulu, PAKSI Jenjang Muda</p>	<p>Setelah sertifikasi merasa lebih percaya diri ketika melakukan aksi-aksi penyuluhan karena memiliki legalitas sebagai Penyuluh Antikorupsi, membangun pertemanan kolaborasi dan berjejaring, memperoleh kesempatan luas untuk peningkatan kapasitas.</p> <p>Terlibat dalam tim Unit Pengendalian Gratifikasi, tim WBS, narasumber materi antikorupsi pada setiap kegiatan yang relevan di institusi, dosen dan pejabat struktural termotivasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya.</p> <p>Mendirikan Komunitas Mahasiswa Antikorupsi (KOMISI) Poltekkes Kemenkes Bengkulu, yang sukses menghasilkan mahasiswa-mahasiswa Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi; penggagas dan Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Raflesia Bengkulu, mendorong terbitnya 7 kebijakan Kepala Daerah mengenai Implementasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah.</p>
4	<p>Nanang T.Puspito, Guru Besar dan Dosen Institut Teknologi Bandung , PAKSI Jenjang Muda</p>	<p>Untuk memberikan kontribusi positif pada upaya implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, melakukan penyuluhan antikorupsi secara baik dan benar, untuk mendapatkan pengakuan formal.</p> <p>Manfaat sertifikasi : dapat melakukan penyuluhan secara baik dan benar, pengetahuan antikorupsi semakin membaik, pengakuan formal sebagai penyuluh, mengajar matakuliah Pendidikan Antikorupsi secara lebih baik.</p> <p>Inovasi : Kanal Youtube khusus berisi video-video tentang pendidikan antikorupsi, Instagram khusus memuat konten tentang pendidikan antikorupsi, pembina Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia dan forum antikorupsi lainnya.</p>
5	<p>Kurnia Wijaya Santoso, guru dan Kepala Sekolah SMA Bina Insan Mandiri di Nganjuk Jawa Timur, PAKSI jenjang Madya</p>	<p>Dorongan untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara, bermanfaat bagi orang lain, resah dengan kondisi korupsi dan perilaku koruptif penyelenggara negara.</p> <p>Manfaat sertifikasi : memiliki kompetensi materi yang standar, mendapatkan jejaring, pengakuan atas kompetensi dari keluarga, atasan/Yayasan, Dinas Pendidikan dan masyarakat sekitar, terpeliharanya kompetensi dan update informasi dan inspirasi terkait pendidikan antikorupsi.</p> <p>Inovasi : Inseri materi serta program integritas dan antikorupsi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, menciptakan SINTAS SANTIK (Sekolah Integritas, Sekolah Antikorupsi), membentuk komunitas dan forum guru integritas yang di dorong untuk menjadi penyuluh antikorupsi tersertifikasi, membuat program literasi</p>

		antikorupsi (terbitnya karya siswa berupa buku bertema Integritas dan Antikorupsi), membuat Rumah Literasi Antikorupsi untuk memfasilitasi anak-anak di lingkungan bermanin boardgame dan membaca buku cerita antikorupsi, membuat Kompetisi Boardgame di sekolah.
6.	Intan Hestika, guru dan Wakil Kepala Sekolah BA Aisyiyah Kajen di Klaten, Wakil Kepala Sekolah , PAKSI jenjang Madya	<p>Panggilan jiwa untuk berkontribusi dalam menginsersi pendidikan antikorupsi di setiap ruang ruang kelas.</p> <p>Manfaat mempunyai benteng pertahanan pribadi untuk terus berintegritas; teman sejawat makin semangat bersama dalam gerakan pencegahan korupsi di sekolah, menjadi role model sikap integritas bagi peserta didik . Semakin terwujudnya visi misi sekolah dalam menyiapkan generasi berkarakter, tata kelola sekolah semakin transparan dan akuntabel, membangun <i>habits</i> warga sekolah untuk selalu bersikap integritas.</p> <p>Berkontribusi di daerah maupun provinsi terkait dengan insersi pendidikan antikorupsi, penyuluhan untuk siswa, guru, kepala sekolah, pihak terkait pendidikan; memberdayakan Komunitas Guru Belajar , sebagai Guru Penggerak yang aktif berkolaborasi dalam sosialisasi dan insersi modul antikorupsi;</p> <p>Inovasi : pengurus Komunitas Penyuluh Antikorupsi Jawa Tengah (KomPAKJAteng), menginisiasi dan menjadi koordinator Komunitas Penyuluh Antikorupsi Karesidenan Solo Raya, inovasi media pembelajaran boardgame integritas, mengembangkan boardgame DONAT (Dolanan Anak Hebat); literasi antikorupsi untuk pelajar tingkat, melakukan kajian ilmiah terkait gerakan antikorupsi, mengembangkan komunitas ACYC (anti-corruption Youth Community), YapyYapo (ya Penyuluh, ya Pendongeng) dan Pintar Bermain</p>
PAKSI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)		
No	Identitas PAKSI	Petikan Wawancara
7	Badrul , Penelaah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten	Dampak menjadi PAKSI semakin berhati-hati dalam menjalankan tugas yang menggunakan APBD/APBN karena sudah paham detail tentang Tindak Pidana Korupsi dan dampaknya. serta semakin berani menyuarakan gerakan antikorupsi. Di jadikan role model di Inspektorat sehingga harus konsisten berintegritas.

	Sumenep, Madura. PAKSI jenjang Madya	<p>Ditugaskan menjadi PIC Unit Pengendalian Gratifikasi, narasumber sosialisasi gratifikasi, tugas Monev Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi. Dapat merealisasikan tugas APIP untuk upaya pencegahan korupsi, mengawal Inspektorat untuk MCP, PPG, Zona Integritas, WBK, WBBM.</p> <p>Penghargaan dari KPK RI sebagai Insan Unit Pengendalian Gratifikasi 2021 dan PAKSI Inspiratif 2021, Ketua Jawa Timur Penyuluh Antikorupsi (Jatim PAK).</p>
8	Achmad Suryaman, Auditor Internal pada Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, PAKSI jenjang Muda	<p>Ingin berkontribusi pada pencegahan korupsi di lingkungan Kemenkes, menjadi PAKSI agar punya kompetensi dalam menjalankan tupoksi pengawasan internak pemerintah melalui <i>anticorruption activities</i>.</p> <p>Dibekali pengetahuan, ketrampilan dan penjagaan integritas oleh ACLC KPK, saling menyemangati, memotivasi dan menginspirasi sesama PAKSI dalam komunitas/forum. Bersama Subtim Pendidikan Antikorupsi mendorong keberadaan penyuluh antikorupsi di setiap satuan kerja; terus berinovasi menghidupkan penyuluhan antikorupsi melalui media sosial.</p> <p>Ketua Bidang Pengembangan Media di Forum Penyuluh Antikorupsi Profesional Kesehatan (PAK-PROKES)</p>
9	Syarifuddin, Inspektur di Inspektorat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. PAKSI jenjang Muda	<p>Sertifikasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi dan mempermudah dalam melakukan penyuluhan antikorupsi. Menunjang fungsi APIP dalam pencegahan korupsi. Ada nilai tambah bagi instansi dalam peningkatan kapabilitas APIP, dengan mendorong seluruh personil APIP untuk menjadi PAKSI.</p> <p>Menyerukan kepada unit kerja untuk berintegritas, tidak melakukan penyimpangan dalam mengelola keuangan daerah demi kemajuan dan akselerasi daerah</p> <p>Berinovasi dalam mendorong transparansi pemberian layanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat dalam wujud Aplikasi eProksi (Elektronik Program Pencegahan Korupsi Kota Kendari) dan aplikasi JARI (Jaga Kendari)</p> <p>Ketua Forum PAKSI Sulawesi Tenggara, dengan misi melaksanakan aksi-aksi edukasi antikorupsi ke masyarakat Sulawesi Tenggara.</p>

10	Eduar, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) di Inspektorat Daerah Kota Dumai, PAKSI jenjang Muda	<p>Korupsi merajalela dan integritas masyarakat masih rendah; sekolah-sekolah di Provinsi Riau belum menanamkan nilai integritas dan antikorupsi dalam proses pembelajaran; masyarakat dan pemerintah belum memahami korupsi.</p> <p>Dampak aksi setelah sertifikasi : pejabat pemerintah di kota Dumai semakin meningkat ekuntabilitasnya, kepala-kepala sekolah mulai membenahi pembelajaran dan pelayanan di sekolah dan menyusun peta resiko untuk menghindari korupsi.</p> <p>Mendorong kepala-kepala satuan kerja untuk mulai mewujudkan wilayah bebas korupsi, di sisi lain menyerukan sekolah-sekolah menjadi Sekolah Berintegritas dengan menerapkan pendidikan antikorupsi. Penyuluhan bagi seluruh pegawai satuan kerja di kota Dumai, konsultasi fraud, penyuluhan antikorupsi dalam Rapat Kerja Kepala Sekolah dan pemerintah kota Dumai; setiap bulan berkeliling menyuluh ke satu SD, satu SMP, dan satu SMK/MA/SMA; aktif membuat puisi dan film antikorupsi</p> <p>Berprestasi Terbaik di Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2021, Penyuluh Inspiratif 2021 oleh KPK.</p>
PAKSI KOMUNITAS ANTIKORUPSI		
No	Identitas PAKSI	Petikan Wawancara
11	Peranita Sagala, arsitek dan dosen, Ketua Komunitas Medan Membaca, PAKSI bersertifikasi jenjang Madya	<p>Komunitas yang mengkombinasikan kegiatan membaca dengan kegiatan literasi antikorupsi, seperti permainan yang dapat meningkatkan daya baca anak.</p> <p>Pembelajaran dari kegiatan-kegiatan ACLC KPK membantu peningkatan kapasitas anggota Medan Membaca dan memperluas jaringan kolaborasi; sering menjadi rujukan narasumber untuk kegiatan antikorupsi bagi anak-anak di kota Medan, bahkan Sumatera Utara.</p> <p>Mendirikan Pojok Baca, taman bacaan yang dibuka di taman kota Medan secara rutin pada waktu tertentu;</p> <p>Penghargaan sebagai Komunitas Inspiratif 2021 oleh KPK.</p>
12	Manggazali, Wiraswasta, Ketua Komunitas Yapy Yapo (Ya Penyuluh Ya	<p>Komunitas ingin memberikan warna tersendiri terhadap aksi-aksi antikorupsi, memfasilitasi PAKSI yang tertarik dengan dongeng dan menjadikannya sebagai metode kreatif dalam penyuluhan antikorupsi.</p>

	Pendongeng), PAKSI bersertifikasi jenjang Muda	<p>Memiliki 28 anggota PAKSI bersertifikasi dari berbagai daerah dan profesi, yang saling belajar terkait pengetahuan dan keterampilan menyuluh antikorupsi melalui dongeng.</p> <p>Kegiatan DIARI (Dongeng Integritas untuk Anak Republik Indonesia), kegiatan mendongeng secara daring setiap bulan. Parade dongeng saat Hari Dongeng. Yapy Yapo memperluas dongeng untuk orangde wasa, juga melalui tayangan Youtube dan Instagram.</p> <p>Penghargaan Komunitas Inspiratif tahun 2021 oleh KPK.</p>
13	Luthfia Zein Pattarani, karyawan swasta, Pembina Komunitas #Obat Manjur – Orang Hebat Main Jujur, PAKSI bersertifikasi jenjang Madya.	<p>Komunitas lahir di tangan anak-anak muda yang peduli dengan pentingnya sikap sosial berintegritas sejak usia belia.</p> <p>Penggagas istilah #BERJUMPADIKERTAS (Berani, Jujur, Mandiri, Peduli, Adil, Disiplin, Kerjakeras, Tanggungjawab, Sederhana) ; memperkenalkan nilai-nilai integritas melalui boardgame, film, lagu, dongeng, dan buku agar pembelajaran menyenangkan.</p> <p>#Obatmanjur sudah memiliki cabang di beberapa kota, dengan 90-an anggotanya dari beragam profesi. Keberadaan 18 orang PAKSI bersertifikasi di komunitas ini menguatkan pemberdayaan seluruh anggota melalui kelas-kelas <i>capacity building</i>.</p> <p>Inovasi program pendidikan antikorupsi berbasis keluarga #IntegrityFromHome, forum Bibit Keluarga (Bincang-bincang Integritas Keluarga), #IFHTAR (#IntegrityFromHome , #TalkAboutRelationship)</p> <p>Penghargaan Komunitas Inspiratif 2021 dari KPK RI.</p>
14	Suci Raharjo, Pegawai KPK RI, Founder Komunitas Raharjo Institut, PAKSI bersertifikasi jenjang Utama	<p>Didirikan dalam merespon pandemi Covid 19, untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembelajaran integritas dan antikorupsi. melalui berbagai media dan platform online secara gratis agar menjangkau masyarakat seluas-luasnya.</p> <p>Masyarakat yang mendapatkan manfaat lebih dari 300 orang; pengurus yang sebagian PAKSI bersertifikasi banyak inovasi dalam pembelajaran integritas dan antikorupsi.</p> <p>Menyelenggarakan secara rutin webinar, menginisiasi dan menerbitkan buku-buku antologi antikorupsi yang sebagian besar penulisnya adalah PAKSI bersertifikasi.</p>

		Penghargaan sebagai Komunitas Terinspirasi 2021 dari KPK RI.
--	--	--

4.2 Analisa Hasil

Program sertifikasi oleh LSP KPK tidak berhenti pada pemberian pengakuan formal dalam bentuk sertifikasi kompetensi kepada PAKSI, tetapi justru merupakan pembuka jalan bagi para PAKSI untuk mengembangkan kapasitas dan lebih konsisten dalam melakukan penyuluhan. Dibawah manajemen ACLC, diselenggarakan beragam program dan kegiatan *capacity building* khusus bagi PAKSI bersertifikasi, yang sifatnya membangun kapasitas penyuluh para PAKSI, baik dari aspek pengetahuan maupun model pembelajaran. Umumnya kegiatan diberikan di ruang daring sehingga dapat menjangkau dan diakses oleh PAKSI dari wilayah manapun. Selain itu, dengan semakin banyaknya jumlah PAKSI bersertifikasi, ACLC mendorong agar para PAKSI membentuk forum dan komunitas berdasarkan geografi atau profesi, Dengan berjalannya waktu, pertumbuhan forum dan komunitas semakin banyak atas inisiatif para PAKSI sendiri.

Dari kajian terhadap hasil wawancara terhadap para responden yang dipaparkan dalam tabel diatas, dihasilkan sejumlah analisis berikut :

1. Secara umum, PAKSI Pendidik dan PAKSI APIP memiliki motivasi besar yang serupa yang mendorong individu-individu tersebut untuk memutuskan menjadi seorang penyuluh antikorupsi. Motivasi tersebut adalah adanya keprihatinan dan keresahan melyanksikan keterpurukan bangsa dan negara Indonesia yang diakibatkan permasalahan korupsi, serta kegeraman terhadap koruptor-koruptor penyelenggara negara. Hal ini membuat para PAKSI ini terpanggil untuk berkontribusi terhadap upaya pencegahan korupsi melalui peran penyuluh antikorupsi. Pengakuan formal melalui sertifikasi diharapkan akan menguatkan peran mereka sebagai penyuluh antikorupsi.
2. Secara khusus, PAKSI Pendidik dan PAKSI APIP memberikan gambaran yang berbeda sebagai berikut.

A. PAKSI Pendidik

1. Motivasi responden PAKSI widyaiswara, dosen dan guru dipicu oleh kesadaran akan peran strategis institusi pendidikan sebagai pencetak generasi masa depan, yang mana perlu diberikan pendidikan integritas dan antikorupsi kepada peserta

didik baik siswa, mahasiswa maupun calon ASN. Agar dapat menyampaikan pendidikan dengan efektif, mereka merasakan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajarkan integritas dan antikorupsi, sehingga mereka memutuskan untuk mengikuti program sertifikasi PAKSI.

2. Dampak program sertifikasi ternyata sangat besar bagi responden PAKSI Pendidik. Secara pribadi mereka merasa lebih percaya diri dalam mengajar di sekolah, kampus maupun latsar. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan dalam pengetahuan antikorupsi dan keterampilan penyuluh yang diperoleh dari pembelajaran pada kegiatan-kegiatan *capacity building* yang aktif diikuti. Merekapun semakin kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi terkait pendidikan antikorupsi. Sebagai penyuluh antikorupsi aktif, mereka menjadi *role model* dan aktif terlibat dalam mendorong penerapan integritas di institusinya. Di lingkungan masyarakat mereka juga aktif penyuluh, menginisiasi gerakan antikorupsi bagi pendidik dan komunitas-komunitas antikorupsi.

B. PAKSI APIP

1. Motivasi responden PAKSI APIP dipicu oleh kesaksian akan tindak koruptif yang terjadi baik di lingkungan Inspektorat tempat kerjanya maupun di pemerintahan daerahnya. Tugas sebagai APIP yang salah satunya pencegahan korupsi dalam rangka pengawasan internal pemerintah, menuntut mereka untuk memiliki kompetensi yang mumpuni, sehingga mereka memutuskan untuk mengikuti program sertifikasi penyuluh antikorupsi.
2. Program sertifikasi penyuluh antikorupsi berdampak besar terhadap para responden PAKSI APIP. Secara pribadi mereka semakin berkomitmen dalam menjalankan posisi atau jabatannya dan semakin berani menyuarakan antikorupsi. Selain menjadi *role model*, mereka diberi tugas untuk memimpin upaya pencegahan korupsi di Inspektoratnya. Mereka juga aktif penyuluh kepada masyarakat. Mereka melahirkan inovasi-inovasi dalam mendorong pembenahan di lingkungan Inspektorat maupun pemerintahan dan pelayanan publik daerahnya, termasuk menginisiasi dan mengelola komunitas antikorupsi di wilayahnya. Inovasi mendorong layanan masyarakat yg lebih transparan

C. PAKSI Komunitas

Pembahasan mengenai PAKSI Komunitas agak berbeda. Komunitas-komunitas antikorupsi beranggotakan orang-orang dari berbagai profesi yang secara sukarela melibatkan diri, dengan kesamaan motivasi yaitu menguatkan integritas masyarakat luas. Komunitas-komunitas responden penelitian ini masing-masing memiliki target segmen masyarakat tertentu dan menetapkan metode atau media penyuluhan tertentu yang dianggap sesuai. Untuk dapat menyampaikan integritas dan antikorupsi dengan baik, maka diperlukan pengetahuan dan keterampilan penyuluh yang memadai. Bagi anggota komunitas yang sudah merupakan PAKSI bersertifikasi, mereka sudah memilikinya namun tetap harus mengembangkan kompetensinya sesuai metode penyuluh ala komunitasnya. Sedangkan bagi anggota komunitas lainnya, biasanya mendapatkan pembelajaran pengetahuan dan keterampilan penyuluh dari anggota PAKSI bersertifikasi. Mereka juga didorong untuk lebih meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi. Dalam perjalanannya, terjadi proses dimana satu demi satu anggota komunitas termotivasi untuk mengikuti program Sertifikasi. Dampak keberadaan PAKSI bersertifikasi dalam komunitas ialah semakin baiknya pengelolaan komunitas dan inovasi-inovasi program komunitas, bahkan menjasi komunitas inspiratif.. Hal ini terjadi karena para PAKSI tersebut memperoleh *capacity building* mengenai membangun komunitas dan sebagian diantaranya sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Madya dengan kompetensi mengembangkan komunitas.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis di atas, dengan menggunakan teori *Kirkpatrick's Model of Learning Evaluation* maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a) Program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan lanjutannya berupa program *capacity building* PAKSI sebagai satu kesatuan yang diselenggarakan oleh KPK telah mencapai ke empat level dalam model tersebut, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - Reaksi (level 1)
Semua responden PAKSI Pendidik, APIP, dan Komunitas mendapatkan pengalaman yang memuaskan dan mengapresiasi terhadap program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan program-program *capacity building* PAKSI yang mereka ikuti.
 - Pembelajaran (level 2)
Semua responden PAKSI Pendidik, APIP, dan Komunitas merasakan dampak program berupa peningkatan integritas, komitmen, pengetahuan, dan keterampilan penyuluh antikorupsi. Mereka terus memelihara kompetensinya sebagai penyuluh antikorupsi.
 - Perilaku (level 3)
Semua responden PAKSI Pendidik, APIP, dan Komunitas mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan antikorupsi yang dipelajarinya tersebut dalam aktifitas-aktifitas penyuluhnya di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat luas.
 - Hasil (level 4)
Semua responden PAKSI Pendidik dan APIP memberikan kontribusi yang besar terhadap kesuksesan organisasinya, sedangkan responden PAKSI Komunitas memberikan kontribusinya bagi pengembangan komunitasnya.
- b) Dengan demikian dari penelitian terhadap sejumlah responden yang dianggap merepresentasikan kelompoknya, dapat disimpulkan bahwa dampak dari program Sertifikasi dan program-program *capacity building* pasca sertifikasi telah mencapai ke empat tingkat pembelajaran dengan sangat baik. *Input* berupa motivasi yang kuat dari para responden PAKSI diberikan jalan oleh program Sertifikasi dan kemudian dikelola dengan baik dengan program-program *capacity building*, sehingga menghasilkan *output* pencapaian tujuan yang diharapkan dari program Sertifikasi itu sendiri maupun para PAKSI itu beserta organisasinya. *Success stories* dari para PAKSI responden menunjukkan suksesnya program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi.

5.2 Rekomendasi

Mengingat jumlah PAKSI bersertifikasi saat ini sudah banyak dan akan terus meningkat, maka perlu difikirkan bagaimana menjaga agar program Sertifikasi dapat menjamin kualifikasi PAKSI yang diluluskan salam proses asesmen. Selain itu perlu dirancang bagaimana agar program-program *capacity building* yang semakin dapat menjangkau PAKSI-PAKSI di semua kelompok profesi, agar dapat meningkatkan manfaat bagi organisasi dan lingkungannya. Dengan demikian dampak dan manfaat program Sertifikasi yang sudah baik akan semakin meluas dan massif sehingga makin banyak *success stories* PAKSI-PAKSI di seluruh negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Donna M. Merten, A. T. (2019). *Program Evaluation Theory and Practice, second edition*. London: The Guilford.
- Kartikawati, H. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Dampak Pembelajaran di Sektor Pemerintah*. Jakarta: Kemenkeu CORPU.
- Kirkpatrick, D. L. (2007). *Implementing the Four Levels*. San Francisco: Berrett-Koehler.
- KPK. (2021). *Pastitika, Penyuluh Antikorupsi dalam Angka*. KPK: Jakarta
- KPK RI. (2021). *Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi*. Retrieved from KPK.go.id: <https://aclc.kpk.go.id/program/sertifikasi/sertifikasi-penyuluh-antikorupsi/tentang>
- KPK RI. (2021). *Kupas Tuntas Empat Jenjang Penyuluh Antikorupsi*. Retrieved from KPK.go.id: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220809-kupas-tuntas-empat-jenjang-penyuluh-antikorupsi>
- KPK RI. (2022). *Kurikulum dan Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi Edisi Revisi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan KPK RI.
- LSP KPK. (2021) *Perjalanan LSP KPK*. Jakarta: KPK
- Lubis, E. (2022). Penelitian Kualitatif. *academia.edu*.
- Muhammad Thamrin, H. K. (2011). Evaluasi Program Penyuluhan Pertanian dan Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Pendapatan Petani di Sawah. *Jurnal Umsu*.
- Suprapdiono, G. (2020). *Implementasi Proyek Perubahan : Strategi Pemberantasan Korupsi di Sektor Politik Melalui Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: KPK-LAN.

Success Stories Penyuluh Antikorupsi



Penulis: Asriana Issa Sofia

**Bersinergi
Membangun
Gerakan
Antikorupsi Demi
Mewujudkan
Indonesia yang
Bebas dari
Korupsi**

**Aksi Penyuluh
Antikorupsi
Pendidik
Mempersiapkan
Generasi Baik
Indonesia**

**Aksi Penyuluh
Antikorupsi APIP
Mengawal
Pemerintahan
Baik dan Bersih**

**Aksi Penyuluh
Antikorupsi
Komunitas
Menguatkan
Masyarakat
Berintegritas**

Bersinergi Membangun Gerakan Antikorupsi Demi Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mendorong peran penyuluh antikorupsi untuk memperkuat gerakan pencegahan korupsi di seluruh negeri melalui strategi edukasi.

Percepatan upaya pemberantasan korupsi memerlukan keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan antikorupsi seluas-luasnya.

Peran tersebut terdapat pada penyuluh antikorupsi yang berintegritas tinggi, berpengetahuan antikorupsi dan terampil menyuluh.

Oleh karena itu KPK mendirikan “Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sektor Antikorupsi” untuk memastikan seluruh elemen bangsa memiliki kompetensi dalam melakukan pendidikan antikorupsi secara efektif.

Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Antikorupsi merupakan pengembangan kompetensi edukasi agar dapat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi,” demikian disampaikan Mohamad Rofie Hariyanto, Kasatgas Sertifikasi LSP KPK.

Program Sertifikasi melakukan Uji Kompetensi terhadap penyuluh antikorupsi dengan mengacu pada standar nasional.

Selama enam tahun terakhir KPK membangun kelembagaan, instrumen, sistem, sumberdaya manusia, dan kemitraan untuk menyempurnakan Program Sertifikasi, salah satunya dengan dukungan GIZ.



Proses asesmen sertifikasi, Sumber : LSP KPK RI

Tahun 2016 menjadi awal peletakan pondasi yaitu *Anti-Corruption Learning Centre (ACLC)* sebagai unit pelaksana pendidikan, sosialisasi, kampanye, dan penyiapan Program Sertifikasi, serta SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Untuk pertama kalinya pelatihan PAKSI diselenggarakan dengan melibatkan para calon penyuluh antikorupsi dari berbagai elemen masyarakat.

Pada tahun 2017, LSP KPK diresmikan oleh Pimpinan KPK dan dilisensi oleh Badan Nasional Standar Profesi (BNSP), yang segera dilengkapi dengan perangkat Kode Etik Penyuluh Antikorupsi dan Asesor-asesor Kompetensi.

Untuk pertama kalinya kegiatan asesmen ini dilaksanakan dan mencetak sejumlah PAKSI bersertifikasi. Tak lama kemudian disahkan SKKNI 338 Tahun 2017 tentang Ahli Pembangun Integritas (API) guna memperkuat peran masyarakat dalam membangun sistem integritas yang berstandar nasional pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tahun-tahun berikutnya kemajuan-kemajuan yang signifikan tercatat. Selama tahun 2018, kegiatan asesmen semakin intensif mencetak PAKSI dan API. Tahun 2019, LSP merintis kemitraan dengan Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak di daerah untuk memperluas jangkauan penyelenggaraan Program Sertifikasi. Dengan semakin banyaknya PAKSI dan API, Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi tingkat nasional kemudian dicetuskan sebagai ajang *knowledge sharing* antar penyuluh, yang berlanjut menjadi kegiatan tahunan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia.

Menyikapi pandemi Covid-19, LSP KPK meluncurkan inovasi pelaksanaan Asesmen Jarak Jauh secara daring menggunakan aplikasi AKSESKU. Alhasil, pelaksanaan asesmen justru semakin masif sepanjang tahun 2020-2021 dan melejitkan jumlah PAKSI dan API bersertifikasi. Seiring dengan itu, kegiatan peningkatan kompetensi asesor, pelatihan calon penyuluh antikorupsi, serta *capacity building* PAKSI dilangsungkan secara kontinyu.



Ketika dinyatakan kompeten menjadi PAKSI bersertifikasi,
Sumber : LSP KPK RI

Pada tahun 2021, LSP KPK mendapatkan relisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang berlaku untuk lima tahun berikutnya, sehingga mereka dapat terus menyelenggarakan sertifikasi, termasuk Sertifikasi Naik Jenjang maupun *Recognition Current Competency* (RCC) bagi pemegang sertifikat yang akan habis masa berlakunya.

Program Sertifikasi membuka kesempatan bagi setiap orang melalui beberapa jalur yaitu:

- (1) Jalur Pengalaman, bagi mereka yang sudah berpengalaman menyuluh antikorupsi;
- (2) Jalur Diklat, bagi mereka yang belum berpengalaman menyuluh namun sudah mengikuti pelatihan calon penyuluh antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK, serta yang baru diluncurkan di tahun 2020; dan
- (3) Jalur Matakuliah, bagi mahasiswa yang sudah lulus matakuliah Antikorupsi di perguruan tingginya.

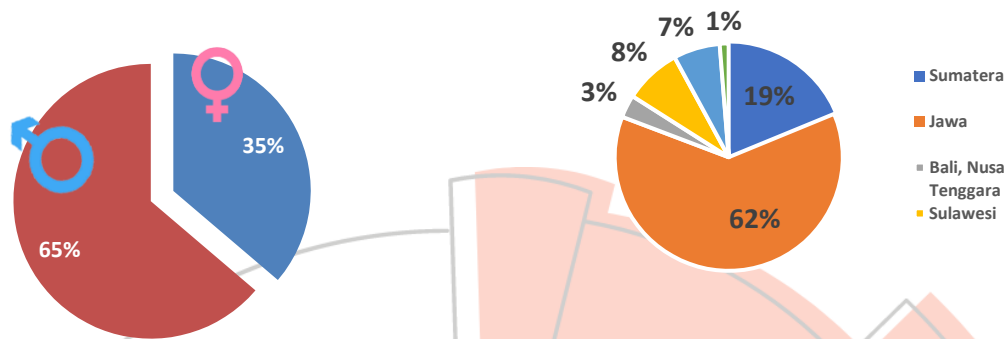
Terdapat 4 skema sertifikasi berdasarkan jenjang kompetensi yang dimiliki oleh seorang penyuluh antikorupsi, yaitu:

- (1) PAKSI Pertama, dengan kemampuan melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi;
- (2) PAKSI Muda, dengan kemampuan memfasilitasi pengembangan kapasitas kelompok sasarannya;
- (3) PAKSI Madya, dengan kemampuan mengembangkan dan memberdayakan komunitas atau forum antikorupsi; serta
- (4) PAKSI Utama, dengan kemampuan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi serta memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan kelompok sasaran penyuluhannya.

Hingga Desember 2021, sudah ada **2047 PAKSI** dan **228 API** yang tersebar di **34 provinsi**, lintas profesi, lembaga, organisasi, dan tidak dibatasi oleh gender maupun usia.

*Dian Novianthi,
Direktur Pendidikan
dan Pelatihan
Antikorupsi KPK*

“Kepada seluruh lapisan masyarakat, mari berkontribusi dengan menjadi penyuluh antikorupsi, bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.”



Profil Penyuluh Antikorupsi Lintas Provinsi, Lintas Profesi, Lintas Gender & Usia

PAKSI berasal dari beragam profesi seperti pegawai KPK, ASN Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, karyawan BUMD dan BUMN, karyawan swasta, widyaiswara, dosen, guru, konsultan, pengawas dan pemeriksa, pengacara, dokter, apoteker, wiraswasta, perangkat desa, wartawan, pelajar dan mahasiswa, filantropis, bahkan marbot masjid, ibu rumah tangga, dan mereka yang belum bekerja.

Gelombang PAKSI menumbuhkan komunitas-komunitas dan forum-forum antikorupsi yang berbasis wilayah, profesi, bahkan minat dan talenta, untuk berjejaring, berkolaborasi dan menjadi ruang belajar dan berbagi antar PAKSI. Hingga akhir tahun 2021, sudah ada 40-an komunitas dan forum dan jumlahnya terus bertambah.

Pimpinan KPK melalui surat Nomor B/567/DKM.02/01-84/02/2022 menyerukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia agar dapat segera memfasilitasi dan memanfaatkan para Penyuluh Antikorupsi yang ada di wilayahnya.

Penyuluh antikorupsi terus bergelora menyuarakan nilai-nilai antikorupsi di seluruh penjuru negeri. Ke depan, peran penyuluh antikorupsi masih perlu terus dimasifkan secara kuantitas maupun kualitas.

“Kepada seluruh lapisan masyarakat, mari berkontribusi dengan menjadi penyuluh antikorupsi, bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, “ ajak Dian Novianthi, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK.

Aksi Penyuluh Antikorupsi Pendidik Mempersiapkan Generasi Baik Indonesia

Pendidikan antikorupsi penting diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas dan antikorupsi kepada generasi muda sehingga mereka mampu membentengi diri dari tindak pidana korupsi maupun perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap pendidik sejatinya sudah memiliki kecakapan mengajar yang mumpuni di bidangnya. Jika disematkan kompetensi antikorupsi, maka akan melahirkan penyuluh antikorupsi yang potensial. Dengan dukungan Program Sertifikasi dan kegiatan-kegiatan *capacity building*, para PAKSI pendidik akan mampu menghidupkan praktik-praktik baik, seperti para PAKSI pendidik berikut ini.



Pengukuhan FPAK Lampung, Sumber : Aris Supriyanto

Aris Supriyanto, widyaiswara di BSDMD Provinsi Lampung, merasa sangat terbantu dengan menjadi PAKSI. “(Saya) jadi mudah mencapai tujuan karena melakukan penyuluhan sistematis sesuai tahapan, termasuk menguasai bahan maupun teknik penyuluh.” jelasnya.

lapun semakin terampil melakukan improvisasi-improvisasi yang membuat penyuluhannya menarik. Saat ini Aris mengetuai Forum Penyuluh Antikorupsi (FPAK) Lampung dan juga Gerakan ASN Berintegritas (RAKATAS).



Inovasi Sekolah Berintegritas Sintas Santik,
<https://www.youtube.com/watch?v=IOyfSb1Vasw>

Bagi **Kurnia Wijaya Santoso**, guru SMA Bina Insan Mandiri di Nganjuk Jawa Timur, sertifikasi menambah kepercayaan diri dan kebanggaan ketika melakukan penyuluhan antikorupsi. “Saya kini memiliki materi-materi antikorupsi yang sesuai standar”, ujarnya.

Sebagai Kepala Sekolah, ia mendorong kebijakan untuk menginsersi materi antikorupsi dan integritas ke dalam kurikulum. Salah satu inovasinya, Sintas Santik (Sekolah Integritas, Sekolah Antikorupsi), memperoleh penghargaan sebagai 20 besar Jawa Timur *Innovative Government Award*. Kurnia juga menggagas pembentukan komunitas dan forum guru calon penyuluh antikorupsi, serta mendirikan Rumah Literasi Antikorupsi bagi anak-anak.



Narasumber mengenai Antikorupsi di Bengkulu TV, Sumber Daisy Novira /BETV

Daisy Novira, dosen matakuliah Pendidikan Antikorupsi di STIKES Sapta Bhakti Bengkulu, juga mengakui manfaat Program Sertifikasi. “Saya merasa lebih percaya diri ketika melakukan aksi-aksi penyuluhan karena memiliki legalitas sebagai Penyuluh Antikorupsi.” tegasnya.

Tidak berhenti di ruang kelas, Daisy dan rekan-rekannya melakukan regenerasi dengan mendirikan Komunitas Mahasiswa Antikorupsi (KOMISI) Poltekkes Kemenkes Bengkulu, yang sukses menghasilkan mahasiswa-mahasiswa Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi. Selain itu, ia adalah salah satu penggagas dan kini menjadi Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Raflesia Bengkulu.



Matakuliah Antikorupsi ITB,
https://www.instagram.com/p/CS_Y0YWhvMN/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Nanang T Puspito, dosen pengagas matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Institut Teknologi Bandung, tidak hanya memperoleh pengakuan formal sebagai PAKSI. “Sejak mengikuti program sertifikasi, kini saya dapat mengajar mata kuliah Pendidikan Antikorupsi secara lebih baik,” tuturnya.

Ia memanfaatkan media sosial dan kini memiliki kanal Youtube khusus berisi video-video tentang pendidikan antikorupsi dan Instagram khusus memuat konten tentang pendidikan antikorupsi.

Hingga sekarang Guru Besar ini terus konsisten mempromosikan implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi di berbagai forum akademis.

Intan Hestika, guru BA Aisyiyah Kajen di Klaten, memutuskan untuk menjadi penyuluh antikorupsi karena ia yakin bahwa pendidikan antikorupsi di ruang-ruang kelas jika dilakukan secara konsisten maka akan berdampak besar,” ujarnya.

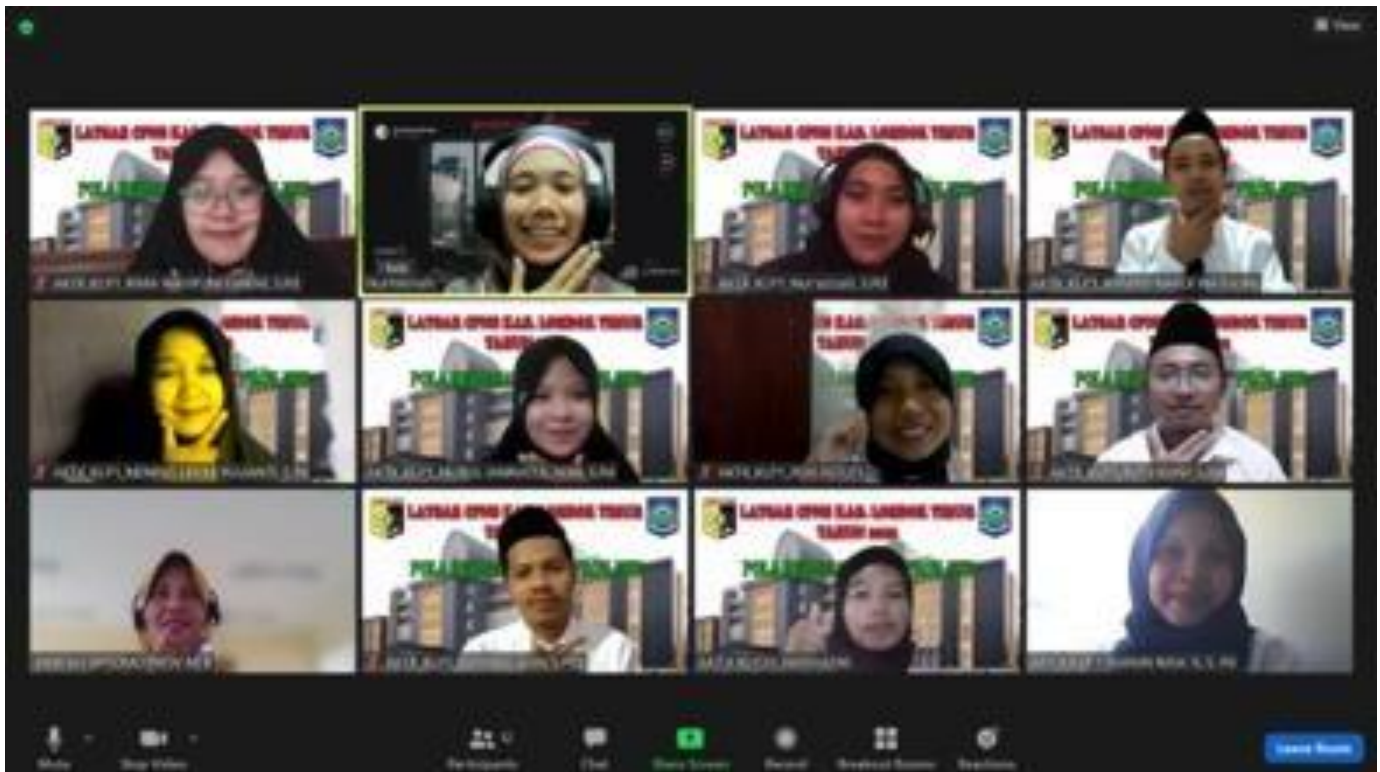
Sejak tersertifikasi, Intan giat mengembangkan metode pembelajaran karakter, salah satu kreasinya adalah boardgame DONAT (Dolanan Anak Hebat).

Wakil Kepala Sekolah ini memberdayakan Komunitas Guru Belajar dan Guru Penggerak dalam sosialisasi dan insersi modul antikorupsi.



Webinar Guru Pembangun Integritas bangsa,
<https://www.youtube.com/watch?v=5e5oiDsEdl0e>

Intan juga aktif mengkampanyekan insersi pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan melalui Komunitas Penyuluh Antikorupsi Jawa Tengah (KomPAK Jateng).



Pelatihan Dasar CPNS bertema Antikorupsi, Sumber : Nurhikmah

Nurhikmah, widyaiswara yang kesehariannya mengajar Pelatihan Dasar CPNS di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan bahwa sertifikasi penyuluh antikorupsi “menjadi pengingat bagi diri sendiri untuk terus konsisten, menjadi *role model*, dan semakin berani dalam menerapkan nilai integritas.”

Kompetensinya yang mumpuni membuat Nurhikmah kerap menjadi narasumber pengembangan kurikulum di instansinya maupun di daerah-daerah. Salah satu inovasinya adalah program Pelatihan Membangun Integritas dan Budaya Antigrafitikasi (Mantra) untuk kelompok-kelompok ASN dan non-ASN di wilayah setempat.

Kisah-kisah PAKSI Pendidik di atas diharapkan dapat membagikan energi positif dalam menyemai nilai-nilai integritas dan antikorupsi agar nantinya menuai agen-agen perubahan masa depan bangsa. Kehadiran lebih banyak PAKSI Pendidik tentu akan menyegerakan terwujudnya harapan tersebut.

Aksi Penyuluh Antikorupsi APIP Mengawal Pemerintahan Baik Dan Bersih

Penyuluhan antikorupsi adalah cara strategis pencegahan korupsi dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih demi memajukan kualitas hidup masyarakat.

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan namun sudah menggurita ke daerah-daerah, akibat salah jalan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dibentuk dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya melalui pencegahan korupsi. Disinilah penyuluh antikorupsi dari kalangan APIP memainkan peranan penting.

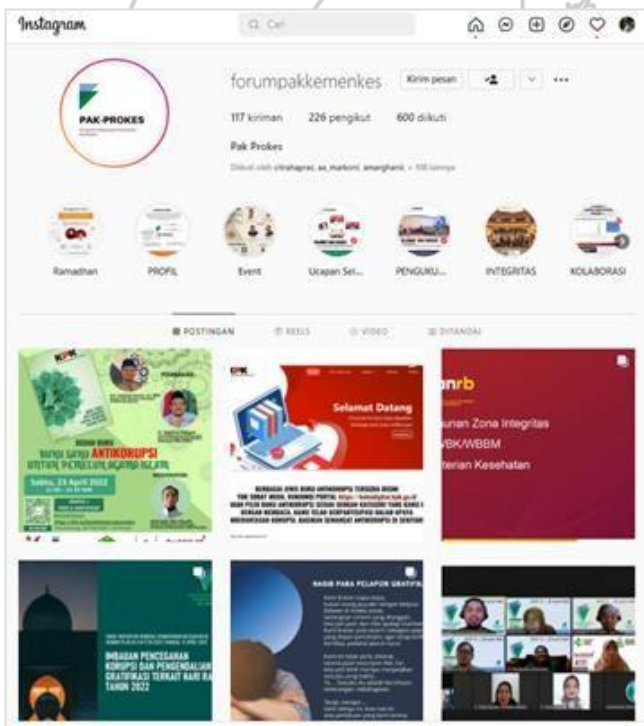
Hingga akhir 2021, terdapat **472 orang** PAKSI bersertifikasi berprofesi sebagai APIP (dan SPI) baik di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, maupun Kementerian/Lembaga. Jumlah ini belum memadai mengingat banyak inspektorat dan kementerian/lembaga belum memiliki penyuluh antikorupsi, sehingga upaya pencegahan korupsinya menjadi kurang optimal. Meskipun demikian tak sedikit PAKSI APIP yang aksi-aksinya menginspirasi, seperti berikut ini.



Penghargaan Insan Unit Pengendalian Gratifikasi KPK RI, Sumber : ACLC KPK RI

Bagi **Badrul** yang bertugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep, Madura, menjadi penyuluh antikorupsi sangat meneguhkan dirinya. “Saya semakin berhati-hati dalam menjalankan tugas yang menggunakan APBD/APBN karena sudah paham sangat detail tentang Tindak Pidana Korupsi, dampak sosial dan biaya sosial yang ditimbulkan korupsi. Saya juga semakin berani menyampaikan dan menyuarakan gerakan antikorupsi,” tegasnya. Selain menjadi Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi, Badrul terlibat dalam Tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Sumenep.

Ia gencar melakukan penyuluhan antikorupsi meskipun harus mengarungi laut menuju ke pulau-pulau kecil. Atas dedikasinya, Ketua Jawa Timur Penyuluh Antikorupsi (Jatim PAK) ini memperoleh penghargaan dari KPK RI sebagai Insan Unit Pengendalian Gratifikasi 2021 dan PAKSI Inspiratif 2021.



Optimalisasi media sosial Forum PAK-PROKES

<https://instagram.com/forumpakkemenkes?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

Achmad Suryaman, Auditor Internal pada Itjen Kementerian Kesehatan, berangkat dari keinginannya untuk berkontribusi pada pencegahan korupsi di lingkungan Kemenkes.

“Saya menjadi PAKSI agar punya kompetensi, karena yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi,” ujarnya.

Merespon hasil Survei Penilaian Integritas 2021 yang menunjukkan efektifitas upaya penyuluhan antikorupsi di Kemenkes masih rendah, Achmad bersama Subtim Pendidikan Antikorupsi mendorong keberadaan penyuluh antikorupsi di setiap satuan kerja.

“Tidak ada yang sia-sia, karena semua aktivitas pencegahan korupsi juga dapat diakui angka kreditnya dalam kinerja APIP,” jelas Achmad.

“Dari komunitas-komunitas yang diikutinya, saya banyak terinspirasi oleh pribadi-pribadi hebat sesama PAKSI. Mereka rela bekerja sukarela tanpa dibayar. Saya belajar makna keberanian, kejujuran, kepedulian”, tuturnya. Achmad kini merupakan Ketua Bidang Pengembangan Media di Forum Penyuluh Antikorupsi Profesional Kesehatan (PAK-PROKES) yang terus berinovasi menghidupkan penyuluhan antikorupsi melalui media sosial.



Sosialisasi Elektronik Program Pencegahan Korupsi (e-PROKSI) kota Kendari, Sumber : teramedia.id
<https://www.instagram.com/p/CTttnJB4kw/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

Syarifuddin, Inspektur di Inspektorat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menyatakan, “Saya mengikuti Program Sertifikasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi dan mempermudah dalam melakukan penyuluhan antikorupsi.”

Syarifuddin tak henti menghimbau seluruh APIP di instansinya untuk mengikuti jejaknya menjadi penyuluh antikorupsi, sembari selalu terjun memberikan arahan program-program membangun integritas. “Saya menyerukan kepada unit kerja untuk berintegritas, tidak melakukan penyimpangan dalam mengelola keuangan daerah demi kemajuan dan akselerasi daerah.” jelasnya.

Aplikasi eProksi (Elektronik Program Pencegahan Korupsi Kota Kendari) dan aplikasi JARI (Jaga Kendari) merupakan inovasi dalam mendorong transparansi pemberian layanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat. Saat ini Syarifuddin merupakan Ketua Forum PAKSI Sulawesi Tenggara, dengan misi melaksanakan aksi-aksi edukasi antikorupsi ke masyarakat Sulawesi Tenggara.

Hingga akhir 2021, terdapat **472 orang PAKSI** bersertifikasi berprofesi sebagai APIP (dan SPI) baik di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, maupun Kementerian/Lembaga.



Menyuluh di DPRD Kota Dumai, Sumber : Eduar

Eduar, yang bertugas di Inspektorat Daerah Kota Dumai, menguatkan tekadnya untuk menjadi penyuluh antikorupsi karena keresahannya. “ Sekolah-sekolah di Provinsi Riau belum menanamkan nilai integritas dan antikorupsi dalam proses pembelajaran, padahal sekolah adalah sarana pembentukan calon pemimpin.”

“Sebagian besar masyarakat dan pemerintah belum memahami bentuk-bentuk korupsi sehingga tanpa mereka sadari melakukannya,” jelasnya.

Eduar mendorong kepala-kepala satuan kerja untuk mulai mewujudkan wilayah bebas korupsi, di sisi lain menyerukan sekolah-sekolah menjadi Sekolah Berintegritas dengan menerapkan pendidikan antikorupsi.

“Setiap bulan saya berkeliling melakukan penyuluhan ke satu SD, satu SMP, dan satu SMK/MA/SMA,” tuturnya. Eduar bahkan aktif membuat puisi dan film antikorupsi. Aksi-aksinya membuat Eduar dianugerahi penghargaan APIP Berprestasi Terbaik di Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2021 serta Penyuluh Inspiratif 2021 oleh KPK.

Kisah-kisah PAKSI APIP di atas mencerminkan aksi-aksi luar biasa pembangun ekosistem antikorupsi di lingkup wilayah kewenangan mereka. Semakin banyak PAKSI APIP hadir di setiap titik wilayah, akan semakin cepat pertumbuhan kemajuan daerah-daerah.

Aksi Penyuluh Antikorupsi Komunitas Menguatkan Masyarakat Berintegritas

Komunitas antikorupsi hadir sebagai gerakan dari masyarakat untuk masyarakat, menyalakan jiwa integritas dan antikorupsi di semua lini.

Efek samping dari gelombang penyuluh antikorupsi ialah pertumbuhan forum dan komunitas antikorupsi. Eksistensinya tak lepas dari peran PAKSI-PAKSI bersertifikasi Madya yang mengembangkan dan memberdayakannya melalui pendampingan aksi, memfasilitasi kolaborasi, serta memobilisasi kampanye dan gerakan antikorupsi.



Pojok Membaca : mengajak anak-anak bermain SEMAI (Sembilan Nilai Antikorupsi) setiap hari Minggu

Komunitas Medan Membaca

dimaknai sebagai area dengan aktivitas membaca. Salah satunya adalah Pojok Baca, taman bacaan yang dibuka di taman kota Medan secara rutin pada waktu tertentu.

Dalam perjalanannya, keberadaan penyuluh antikorupsi mengkombinasikan kegiatan ini dengan kegiatan literasi antikorupsi, seperti permainan yang dapat meningkatkan daya baca anak. Menurut Ketua komunitas, Peranita Sagala, “Keberadaan enam orang PAKSI bersertifikasi menghidupkan kegiatan literasi antikorupsi secara rutin.”

“Pembelajaran dari kegiatan-kegiatan ACLC KPK membantu peningkatan kapasitas anggota Medan Membaca dan memperluas jaringan kolaborasi,” lanjutnya.

Medan Membaca sering menjadi rujukan narasumber untuk kegiatan antikorupsi bagi anak-anak di kota Medan, bahkan Sumatera Utara. Perkembangan yang potensial ini menjadikan Komunitas Medan Membaca mendapatkan penghargaan sebagai Komunitas Inspiratif 2021 oleh KPK.



Serial Dongeng Integritas, Sumber Channel youtube Yapy Yapo,
<https://www.youtube.com/channel/UCMXibXWNjHlyg5W-8cZq2lw>

Yapy Yapo (Ya Penyuluh Ya Pendongeng)

memberikan warna tersendiri dalam aksi antikorupsi karena mewadahi talenta mendongeng para penyuluh antikorupsi, dengan misi mengusung dongeng sebagai media penyuluhan antikorupsi.

“Mendongeng adalah cara efektif menyampaikan pesan tanpa menggurui, sebaliknya menciptakan keceriaan bagi pendongeng maupun yang penikmatnya,” ujar Manggazali, Ketua komunitas.

Komunitas ini memiliki 28 anggota dari berbagai daerah dan profesi, 18 orang diantaranya PAKSI bersertifikasi yang aktif yang menyumbang ide-ide kegiatan Yapy Yapo, salah satunya DIARI (Dongeng Integritas untuk Anak Republik Indonesia), kegiatan mendongeng secara daring setiap bulan.

Yapy Yapo terus memperluas akses masyarakat terhadap dongeng antikorupsi dengan memperluas dongeng untuk orang dewasa, juga melalui tayangan Youtube dan Instagram. Keunikannya memberikan komunitas ini penghargaan Komunitas Inspiratif 2021 dari KPK RI.



Agen #Obat Manjur Goes to School menyuluh di sekolah, Sumber :
#Obat Manjur Makassar

Komunitas #Obat Manjur – Orang Hebat Main Jujur lahir di tangan anak-anak muda yang peduli dengan pentingnya sikap sosial berintegritas sejak usia belia. “Kami menggagas #BERJUMPADIKERTAS dengan menggunakan metode *Belajar, Bermain, Berbagi*,” jelas Luthfia Zein Pettarani, pembina komunitas. #BERJUMPADIKERTAS merupakan singkatan dari nilai-nilai integritas Berani, Jujur, Mandiri, Peduli, Adil, Disiplin, Kerjakeras, Tanggungjawab, dan Sederhana yang dikenalkan melalui *boardgame*, film, lagu, dongeng, dan buku agar pembelajaran menyenangkan.

Kini #Obatmanjur sudah memiliki cabang di beberapa kota, dengan 90-an anggotanya dari beragam profesi. Keberadaan 18 orang PAKSI bersertifikasi di komunitas ini menguatkan pemberdayaan seluruh anggota melalui kelas-kelas *capacity building*.

Serangkaian inovasi diluncurkan komunitas ini yaitu program pendidikan antikorupsi berbasis keluarga #IntegrityFromHome, forum berbagi kisah-kisah alumninya Bibit Keluarga (Bincang-bincang Integritas Keluarga), serta #IFHTAR (#IntegrityFromHome #TalkAboutRelationship).



Webinar Antikorupsi, Sumber : Raharjo Institut

Komunitas Raharjo Institut

didirikan untuk merespon pandemi Covid 19 dengan tujuan memfasilitasi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Diri, melalui berbagai media dan platform daring secara gratis agar menjangkau masyarakat seluas-luasnya.

Kegiatan tersebut kemudian disandingkan dengan Pembelajaran Integritas dan Pendidikan Antikorupsi. “Karena ilmu tanpa integritas dapat menghancurkan siapapun, sebaliknya integritas tanpa ilmu juga tak akan berarti dan tak akan dihargai oleh siapapun,” jelas Suci Raharjo, Founder komunitas.

Sejumlah webinar telah diselenggarakan dan beberapa buku antologi antikorupsi telah diterbitkan.

Meskipun baru ada tiga PAKSI bersertifikasi dalam kepengurusan, namun jumlah ini terus bertambah sehingga akan berdampak positif bagi kemajuan komunitas dan meningkatkan penerima manfaat dari aksi-aksi komunitas. Pergerakan aktif Raharjo Institut mendapatkan apresiasi sebagai Komunitas Terinspirasi 2021 dari KPK RI.

Komunitas-komunitas antikorupsi bekerja dengan caranya sendiri. Mereka terjun dalam proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Semakin banyak orang berpartisipasi dan bekerjasama dalam komunitas antikorupsi, maka akan menyegerakan terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi integritas.